

**PENGINTEGRASIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP
MARAKNYA PENGAMEN ANAK-ANAK DI SIMPANG 4 CHARITAS KOTA
PALEMBANG**

Yuni Antika¹, Aulia Turrahmi², Suryani Damayanti³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

Email Korespondensi: antikayuni677@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of increasing numbers of child street performers at the Charitas intersection in Palembang reflects social issues closely related to family poverty, low levels of education, and weak child protection. This study aims to analyze the root causes that drive children onto the streets and formulate family-based policy recommendations through the integration of social security. The method used is a descriptive qualitative approach with field observation techniques, interviews with five street children, and a documentation study of regulations and previous research. The results of the study show that family economic factors are the dominant cause, characterized by large family size, unstable income, limited access to education, and the potential for exploitation by adults. The resulting impacts include dropping out of school, loss of growth and development opportunities, and the perpetuation of intergenerational poverty. These findings indicate that the policies that have been implemented so far, such as raids and temporary guidance, have not addressed the root of the problem. The conclusion of this study emphasizes the importance of integrated and sustainable interventions through the strengthening of social security, family assistance, and the restoration of access to education. The main recommendation is the integration of assistance programs such as PKH, KIP, KIS, and social assistance to ensure that children return to school and families receive adequate economic support in an effort to break the cycle of poverty.

Keywords: Child Buskers, Family Poverty, Social Security, Public Policy.

ABSTRAK

Fenomena meningkatnya jumlah anak pengamen jalanan di persimpangan Charitas, Palembang, mencerminkan masalah sosial yang erat kaitannya dengan kemiskinan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab yang mendorong anak-anak turun ke jalan serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis keluarga melalui integrasi jaminan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi lapangan, wawancara terhadap lima anak jalanan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan penyebab dominan, yang ditandai dengan ukuran keluarga yang besar, pendapatan yang tidak stabil, akses pendidikan yang terbatas, dan potensi eksploitasi oleh orang dewasa. Dampak yang ditimbulkan meliputi putus sekolah, hilangnya peluang pertumbuhan dan perkembangan, serta berlanjutnya kemiskinan antargenerasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan sejauh ini, seperti razia dan bimbingan sementara, belum mengatasi akar permasalahan. Kesimpulan studi ini menekankan pentingnya intervensi terintegrasi dan berkelanjutan melalui penguatan jaminan sosial, bantuan keluarga, dan pemulihan akses terhadap pendidikan. Rekomendasi utama adalah integrasi program bantuan seperti PKH, KIP, KIS, dan bantuan sosial untuk memastikan anak-anak kembali ke sekolah dan keluarga menerima dukungan ekonomi yang memadai.

Kata kunci: Pengamen Anak-anak, Kemiskinan Keluarga, Jaminan Sosial, Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya jumlah pengamen anak-anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang menunjukkan adanya persoalan sosial yang kompleks yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, lemahnya akses pendidikan, serta kurangnya perlindungan bagi anak-anak dari keluarga rentan. Palembang sebagai kota besar dengan arus kendaraan dan aktivitas masyarakat yang tinggi memberikan ruang bagi munculnya aktivitas informal, termasuk anak-anak yang bekerja di jalanan sebagai pengamen, pengemis, atau penjual barang kecil. Aktivitas ini bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mengancam pemenuhan hak dasar anak seperti hak untuk bermain, belajar, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman. Berbagai program pemerintah seperti razia Satpol PP, pembinaan sementara, hingga penyediaan pendidikan alternatif telah dilakukan, namun belum memberikan hasil yang signifikan karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kemiskinan keluarga dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Banyak anak yang kembali ke jalan setelah dibina karena situasi ekonomi keluarga tidak berubah dan tuntutan hidup sehari-hari lebih mendesak daripada keberlanjutan pendidikan. Meluasnya fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya penyelesaian tidak dapat hanya berfokus pada anak sebagai individu, tetapi harus melibatkan keluarga, lingkungan sosial, dan kelembagaan pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa didukung oleh strategi implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan institusi pemerintah.

Program jaminan sosial yang telah ada di Indonesia seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada keluarga miskin. Akan tetapi, cakupan program ini terhadap keluarga pengamen masih terbatas karena proses pendataan yang belum optimal dan kurangnya integrasi antar program. Pengintegrasian program-program jaminan sosial tersebut secara sistematis dan terkoordinasi dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi kemiskinan keluarga dan mencegah anak turun ke jalan, sekaligus memastikan akses pendidikan yang berkelanjutan bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif dan berpihak pada penyelesaian permasalahan pengamen anak secara menyeluruh. Melalui analisis mendalam terhadap akar penyebab, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya efektif dalam mengurangi jumlah pengamen anak, tetapi juga berkelanjutan dalam memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Palembang dalam mengembangkan strategi penanganan anak jalanan yang lebih komprehensif dan berbasis pada kebutuhan nyata keluarga pengamen.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pengamen anak-anak di kawasan Simpang 4 Charitas Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk melihat aktivitas anak-anak yang mengamen, kondisi lingkungan tempat mereka bekerja, serta pola interaksi dengan pengguna jalan. Selain observasi, wawancara semi terstruktur dilakukan kepada lima anak pengamen dengan rentang usia 9 hingga 13 tahun guna menggali latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, serta alasan mereka berada di jalan. Wawancara tambahan juga melibatkan masyarakat sekitar dan pedagang kecil untuk mendapatkan sudut pandang lain terkait keberadaan anak jalanan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

berupa jurnal penelitian terdahulu, laporan Dinas Sosial, data Badan Pusat Statistik, serta peraturan daerah yang mengatur penanganan anak jalanan. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen sehingga analisis yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai akar permasalahan, kondisi sosial ekonomi anak, serta efektivitas kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah.

PEMBAHASAN

Karakteristik Pengamen Anak-anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang

Fenomena pengamen anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang menunjukkan karakteristik yang relatif beragam, baik dari segi usia, latar pendidikan, maupun kondisi keluarga.

Gambar 1: Pengamen Anak-anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang



Sumber: Hasil Observasi, 2025

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang, rentang usia mereka berada di antara 9-13 tahun, dengan sebagian masih bersekolah dan sebagian lainnya sudah tidak melanjutkan pendidikan formal. Anak-anak seperti Sukoi dan Dhea masih duduk di bangku SMP, sementara Nata yang berusia 9 tahun bahkan sudah tidak sekolah. Kondisi ini menggambarkan ketidakmerataan akses pendidikan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta kurangnya dukungan keluarga. Dalam struktur keluarga, sebagian besar berasal dari keluarga besar dengan 5 hingga 11 saudara, dan pendapatan orang tua yang tidak tetap seperti buruh bangunan, pekerjaan serabutan, atau bahkan juga sebagai pengamen, sehingga membuat mereka rentan terjerumus ke aktivitas jalanan. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang memenuhi kebutuhan menjadi faktor dominan yang mendorong anak-anak ini turun ke jalan. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa hampir semua anak bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan harian keluarga. Beberapa di antaranya berada dalam situasi yang lebih berat, seperti Eyyin yang orang tuanya juga pengamen dan ayahnya sakit, serta Nata dan Tisya yang tinggal bersama nenek karena ibu meninggal dan ayah merantau. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa aktivitas mereka berlangsung hampir sepanjang hari, terutama pada jam sibuk lampu merah. Kegiatan mereka bernyanyi dan keberadaan orang dewasa yang memantau mereka mengindikasikan kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi aktivitas pengamen anak secara tidak langsung.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Faktor Penyebab Pengamen Anak-anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang

Fenomena maraknya pengamen anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang tidak dapat dilepaskan dari tekanan ekonomi keluarga yang berada pada kondisi kemiskinan akut.

Gambar 2: Identifikasi Masalah Faktor Ekonomi

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan bagan di atas, keluarga dari anak yang mengamen umumnya memiliki pendapatan tidak stabil, bahkan cenderung berada di bawah standar hidup layak. Orang tua bekerja sebagai buruh bangunan, pekerja serabutan, hingga pengamen itu sendiri, sehingga pendapatan harian mereka kerap tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Situasi ekonomi tersebut mendorong anak menjadi “aset ekonomi” yang dapat membantu menambah penghasilan, sehingga aktivitas mengamen dianggap sebagai strategi bertahan hidup jangka pendek. Pandangan ini mencerminkan bagaimana tekanan ekonomi dapat menggeser peran anak dari penerima perlindungan menjadi penyumbang pendapatan keluarga.

Selain ekonomi, faktor pendidikan memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong anak berada di jalanan.

Gambar 3: Identifikasi Masalah Faktor Pendidikan

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Temuan pada gambar faktor pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan orang tua yang rendah dan terbatasnya akses anak terhadap fasilitas pendidikan menyebabkan pendidikan tidak lagi dipersepsikan sebagai investasi yang penting bagi masa depan. Hambatan biaya tidak langsung seperti transportasi, buku, dan seragam menjadi alasan kuat anak putus sekolah. Beberapa anak dalam wawancara seperti Nata dan Tisya yang tinggal bersama nenek dengan kondisi ekonomi terbatas bahkan sama sekali tidak bersekolah karena keluarga menganggap bekerja di jalanan lebih “menguntungkan” dibanding melanjutkan

pendidikan. Ketika sekolah tidak memberikan manfaat yang tampak dalam jangka pendek, maka aktivitas mengamen dipilih sebagai alternatif yang dianggap lebih realistis untuk mempertahankan hidup keluarga.

Kedua faktor tersebut memperlihatkan pola yang selaras dengan Teori Lingkaran Kemiskinan Oscar Lewis dalam jurnalnya 'The Culture of Poverty', yang menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya kondisi ekonomi, tetapi juga pola hidup, nilai, dan cara berpikir yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini, kemiskinan orang tua memaksa anak bekerja, sementara rendahnya pendidikan baik orang tua maupun anak melemahkan peluang mereka keluar dari situasi tersebut di masa depan. Kemiskinan menciptakan siklus yang berulang, anak kehilangan pendidikan, tidak memiliki keterampilan, kemudian tumbuh dewasa dengan pekerjaan informal berpendapatan rendah, dan akhirnya kembali mewariskan kemiskinan yang sama kepada generasi berikutnya.

Dampak Fenomena Pengamen Anak-anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang

Fenomena pengamen anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang saling berkaitan. Dalam jangka pendek, kondisi ekonomi keluarga yang lemah mendorong anak turun ke jalan sehingga mereka rentan terhadap berbagai risiko sosial seperti kriminalitas, eksploitasi, dan kekerasan di ruang publik. Minimnya pengawasan orang tua membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu di jalan, yang kemudian memicu hilangnya kesempatan beristirahat, bermain, dan belajar sesuai tahap perkembangannya. Selain itu, ketergantungan ekonomi keluarga terhadap pendapatan anak memperkuat pola pikir bahwa mengamen adalah solusi cepat untuk bertahan hidup, sehingga keluarga semakin sulit keluar dari tekanan ekonomi sehari-hari. Dalam jangka panjang, dampak yang ditimbulkan jauh lebih serius karena berkaitan langsung dengan pendidikan dan masa depan anak. Anak-anak yang mengamen cenderung putus sekolah, kehilangan minat belajar, dan tertinggal secara akademik, sehingga sulit melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Ketertinggalan ini berpengaruh pada rendahnya keterampilan dan kompetensi mereka saat dewasa, membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan layak dan berpotensi kembali bekerja di sektor informal. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi, di mana absennya pendidikan memadai berujung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta reproduksi kemiskinan struktural dalam jangka panjang.

Evaluasi Kebijakan Existing

Kebijakan penanganan pengamen anak-anak yang saat ini diterapkan Pemerintah Kota Palembang masih berfokus pada pola penertiban melalui Razia Satpol PP, pendataan, dan pembinaan sementara oleh Dinas Sosial. Berdasarkan regulasi Perda Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 dan Perwako Palembang Nomor 17 Tahun 2014 yang dijelaskan, kegiatan penanganan meliputi pemantauan, pendataan, pembinaan, pencegahan, hingga rehabilitasi sosial sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang. Anak-anak yang terjaring razia dibawa ke kantor Dinas Sosial, diberikan sanksi, lalu dipulangkan kepada keluarga, sementara anak tanpa keluarga dimasukkan ke Rumah Singgah untuk penanganan awal sebelum dikirim ke lembaga lanjutan. Meskipun mekanisme ini berjalan rutin, kebijakan tersebut masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar masalah utama, yaitu kemiskinan keluarga dan kebutuhan ekonomi yang memaksa anak kembali turun ke jalan. Program pemberdayaan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) juga telah diimplementasikan untuk membantu ekonomi orang tua, namun efektivitasnya terbatas. Program ini mengharuskan peserta memiliki keterampilan dan status sebagai kepala keluarga, sehingga banyak keluarga pengamen anak-anak tidak dapat mengaksesnya. Selain itu, regulasi yang ada belum terintegrasi dalam satu kerangka penanganan yang berkelanjutan, sehingga anak-anak tetap kembali ke jalan meskipun telah diberikan pembinaan. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan existing masih fragmentaris, lebih berfokus pada penanganan akibat, bukan akar penyebab, sehingga tidak menjawab pertanyaan fundamental, mengapa anak-anak ini terus kembali mengamen di Simpang 4 Charitas Kota Palembang?

Alternatif Kebijakan dan Analisis Perbandingan

Analisis terhadap maraknya pengamen anak-anak di Simpang 4 Charitas Palembang menunjukkan bahwa akar masalah tidak hanya terletak pada perilaku anak, tetapi terutama pada kemiskinan keluarga, pendidikan yang terputus, dan kurangnya intervensi sosial yang terintegrasi. Oleh sebab itu, tiga alternatif kebijakan dikembangkan untuk menjawab permasalahan secara lebih komprehensif. Alternatif pertama adalah program integrasi jaminan sosial keluarga, yaitu upaya memperluas cakupan bantuan sosial berbasis keluarga melalui PKH, KIP, KIS dan bantuan pangan untuk memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi sehingga mereka tidak lagi harus turun ke jalan. Alternatif kedua adalah pusat pemberdayaan terpadu anak dan keluarga (PPTK), yang berfungsi sebagai pusat layanan satu pintu mencakup pendidikan nonformal, konseling, kesehatan dasar, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Alternatif ketiga adalah pembangunan infrastruktur panti sosial, yaitu revitalisasi rumah singgah menjadi tempat rehabilitasi jangka menengah bagi anak jalanan dengan penyediaan fasilitas pelatihan dan pendidikan kejar paket.

Setiap alternatif kebijakan dianalisis menggunakan kriteria evaluasi William Dunn (1994), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.

Tabel 1: Hasil Perbandingan Kebijakan Alternatif

Kriteria	Alternatif kebijakan		
	Integrasi Jaminan Sosial	Pengembangan Pusat Pemberdayaan Terpadu Anak dan Keluarga	Pembangunan Infrastruktur Panti Sosial
1. Efektivitas	4	3	2
2. Efisiensi	3	3	1
3. Kecukupan	4	2	1
4. Kesamaan	4	4	4
5. Responsivitas	4	2	3
6. Ketepatan	4	3	2
Jumlah Nilai	23	17	13

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Keterangan Skala Penilaian (1-4)

4: Sangat Tercapai → tingkat paling tinggi, menunjukkan kebijakan berhasil mencapai atau bahkan melampaui target secara efektif dan efisien. Indikator keberhasilan terpenuhi secara menyeluruh, dampak kebijakan signifikan dan dirasakan oleh sasaran program.

3: Tercapai Namun Belum Optimal → pada tingkat ini, tujuan kebijakan telah tercapai, namun belum maksimal atau belum sesuai target sepenuhnya. Program berjalan cukup baik, indikator banyak yang terpenuhi, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Misalnya, implementasi masih menemui hambatan atau hasil belum merata.

2: Kurang Tercapai → Kebijakan menunjukkan adanya usaha atau sedikit kemajuan, namun pencapaiannya masih jauh dari target. Beberapa indikator mungkin tercapai secara parsial, namun sebagian besar belum terpenuhi. Efektivitas kebijakan masih rendah dan dampaknya belum signifikan terhadap tujuan yang diharapkan.

1: Tidak Tercapai → Pada tingkat ini, kebijakan atau program sama sekali tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan tidak terpenuhi, bahkan tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Dampak positif kebijakan terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan sangat minim atau tidak terlihat sama sekali.

Dari aspek efektivitas, integrasi jaminan sosial keluarga dinilai paling langsung menjawab akar masalah ekonomi keluarga, sehingga peluang mengurangi jumlah pengamen anak relatif tinggi. PPTK efektif dalam menangani masalah multidimensi karena menggabungkan layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu sistem, sedangkan panti sosial cenderung kurang efektif untuk

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

kasus anak yang tidak menetap karena anak sering kembali ke jalan setelah pembinaan selesai. Dari aspek efisiensi, integrasi jaminan sosial menjadi alternatif yang paling hemat biaya karena memanfaatkan sistem yang sudah ada, berbeda dengan PPTK dan panti sosial yang membutuhkan investasi infrastruktur besar. Dari aspek kecukupan, PPTK dinilai paling mampu memenuhi kebutuhan multidimensional seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara bersamaan. Sementara itu, integrasi jaminan sosial hanya mencakup kebutuhan dasar keluarga, dan panti sosial lebih fokus pada rehabilitasi anak tanpa menyentuh pemberdayaan keluarga secara menyeluruh. Pada kriteria kesamaan, program jaminan sosial paling adil karena diberikan kepada seluruh keluarga miskin yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi. PPTK juga cukup merata, tetapi aksesnya tergantung lokasi pusat layanan. Sebaliknya, panti sosial cenderung kurang berkeadilan karena kapasitasnya terbatas dan hanya menampung sebagian kecil anak jalanan. Dari segi responsivitas, PPTK memiliki responsivitas paling tinggi karena menyediakan pelayanan yang langsung menjawab keluhan dan kebutuhan anak serta keluarga, termasuk konseling dan pendidikan. Integrasi jaminan sosial cukup responsif dalam pemenuhan mendasar, namun kurang untuk aspek psikososial. Panti sosial dinilai kurang responsif karena sifatnya top-down dan sering tidak sesuai dengan preferensi anak maupun keluarga. Terakhir pada kriteria ketepatan, integrasi jaminan sosial paling tepat karena selaras dengan hasil analisis akar masalah bahwa kemiskinan adalah faktor utama. PPTK juga tepat dalam konteks penanganan jangka panjang, sedangkan panti sosial tepat hanya untuk kasus-kasus anak yang membutuhkan penanganan intensif seperti anak tanpa wali.

Rekomendasi Kebijakan dan Implementasi

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan berfokus pada Program Integrasi Jaminan Sosial Keluarga sebagai intervensi utama untuk mengatasi akar permasalahan pengamen anak di Simpang 4 Charitas. Rekomendasi spesifik meliputi pendataan terhadap 150-200 keluarga pengamen dalam tiga bulan pertama melalui kolaborasi Dinas Sosial, Satpol PP, dan perangkat RT/RW dengan verifikasi berbasis DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan akurasi data. Setelah pendataan selesai, seluruh keluarga diintegrasikan ke dalam program jaminan sosial seperti PKH, KIP, KIS, dan bantuan pangan non-tunai dengan target 100 persen keluarga terdata masuk ke dalam sistem dalam enam bulan. Anak-anak diarahkan kembali ke pendidikan formal maupun nonformal dengan monitoring intensif agar tidak kembali putus sekolah. Orang tua juga diberikan pelatihan keterampilan serta akses kepada program pemberdayaan ekonomi, termasuk integrasi dengan sektor kepariwisataan untuk membuka peluang usaha kuliner, minuman, maupun kerajinan tangan sehingga pendapatan keluarga meningkat dan ketergantungan pada pendapatan anak dapat ditekan.

Implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dalam tiga fase. Tahap pertama berlangsung selama 0-12 bulan dan berfokus pada pendataan keluarga, verifikasi DTKS, serta integrasi bantuan sosial dengan dukungan anggaran APBN sebesar Rp500 juta hingga Rp1 miliar per tahun. Tahap kedua yang berlangsung pada tahun pertama hingga ketiga diarahkan untuk memperluas jangkauan program melalui pemberdayaan orang tua, peningkatan akses pendidikan anak, serta penguatan kolaborasi lintas sektor seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan. Tahap ketiga pada rentang tahun keempat hingga kelima menekankan penguatan kapasitas kelembagaan melalui revitalisasi panti sosial, pengembangan infrastruktur layanan, serta pembangunan sistem manajemen data terpadu berbasis DTKS-SIKS-NG agar pemantauan keluarga penerima manfaat dapat dilakukan secara real-time dan transparan. Implementasi bertahap ini disusun agar kebijakan berjalan adaptif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak jangka panjang dalam memutus siklus kemiskinan keluarga pengamen.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dirancang secara ketat untuk memastikan kebijakan tetap berada pada jalur pencapaian target. Evaluasi dilakukan setiap enam bulan dengan melibatkan evaluator independen untuk menilai penurunan jumlah pengamen anak, tingkat relapse, peningkatan pendapatan keluarga, serta penurunan angka kemiskinan. Monitoring harian dilakukan oleh pendamping sosial melalui

aplikasi mobile yang mencatat perkembangan anak dan kondisi keluarga secara real-time. Selain itu, forum koordinasi lintas stakeholder dilaksanakan setiap tiga bulan untuk membahas perkembangan, menyelesaikan hambatan, dan menyinkronkan program antar lembaga. Pelaporan disampaikan secara berkala melalui laporan bulanan Dinas Sosial dan publikasi hasil evaluasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur ini, kebijakan diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini mengungkapkan bahwa fenomena maraknya pengamen anak-anak di Simpang 4 Charitas Kota Palembang merupakan manifestasi dari permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional, terutama berpusat pada kemiskinan keluarga yang akut dan terbatasnya akses pendidikan. Berdasarkan analisis mendalam terhadap karakteristik pengamen anak, faktor penyebab, dan dampak jangka pendek maupun panjang, penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan penertiban konvensional seperti razia Satpol PP dan pembinaan sementara oleh Dinas Sosial tidak mampu memberikan solusi berkelanjutan karena hanya menangani gejala tanpa menyentuh akar permasalahan. Anak-anak yang telah dibina tetap kembali ke jalan karena situasi ekonomi keluarga mereka tidak berubah, dan tuntutan hidup sehari-hari masih memaksa keluarga untuk mengandalkan pendapatan anak sebagai strategi bertahan hidup.

Teori Lingkaran Kemiskinan Oscar Lewis menjadi landasan penting yang menjelaskan bagaimana kemiskinan bukan hanya kondisi ekonomi semata, tetapi juga pola pikir dan nilai-nilai yang diwariskan antar generasi. Hal tersebut tercermin dari bagaimana rendahnya pendidikan orang tua berkontribusi pada persepsi mereka bahwa pendidikan bukanlah investasi penting, sehingga anak-anak lebih diarahkan untuk bekerja mengamen sebagai cara pragmatis memenuhi kebutuhan harian. Siklus ini menciptakan reproduksi kemiskinan antar generasi, di mana anak-anak kehilangan kesempatan pendidikan, tumbuh dewasa tanpa keterampilan memadai, dan berakhir dengan pekerjaan informal berpendapatan rendah yang sama dengan orang tua mereka.

Dari hasil perbandingan tiga alternatif kebijakan menggunakan kriteria William Dunn, penelitian ini merekomendasikan Program Integrasi Jaminan Sosial Keluarga sebagai intervensi utama yang paling efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan pengamen anak. Program ini menonjol dengan skor evaluasi tertinggi (23 dari jumlah maksimal) karena secara langsung menjawab akar masalah ekonomi keluarga melalui integrasi PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan bantuan pangan non-tunai. Pendekatan ini memungkinkan keluarga pengamen untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada pendapatan anak, sehingga anak-anak dapat kembali ke sekolah dan memutuskan siklus kemiskinan. Rekomendasi kebijakan ini disertai dengan rencana implementasi bertahap dalam lima tahun, yang mencakup pendataan sistematis, verifikasi berbasis DTKS, integrasi bantuan sosial, pemberdayaan orang tua, serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah Kota Palembang untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, membangun sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Satpol PP, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat dan berkelanjutan. Dengan mekanisme monitoring yang melibatkan evaluator independen dan pendamping sosial yang berbasis aplikasi mobile, kebijakan dapat disesuaikan secara real-time untuk mengoptimalkan dampak. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi jumlah anak di jalanan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup keluarga, meningkatkan angka partisipasi pendidikan, dan memutuskan lingkaran kemiskinan antar generasi di Kota Palembang.

REFERENSI

- Andalusia, A. R., & Arifin, M. (2025). Potret Pekerja Anak di Jalanan Kota Samarinda (Studi Kasus Pekerja Anak di Simpang Lampu Merah Kecamatan Samarinda ULU). *SAKAAI: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(2), 74-82.
- ANTARA News Mataram. (2025). Pemkot Mataram siapkan pengawasan PMKS selama MotoGP 2025. <https://mataram.antaranews.com/berita/490384/pemkot-mataram-siapkan-pengawasan-pmks-selama-motogp-2025>
- Aprillia, C., & Aliya, S. (2024). Peran Dinas Sosial Kota Palembang dalam Menghadapi Anak Jalanan. *Surya: Jurnal Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(1), 200-210. <https://yptb.org/index.php/sur/article/download/717/599/896>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Pendidikan 2024. <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html>
- Daulay, N. K., Rambe, N., Pohan, S. S., Rambe, F. F., Thaiyibah, A., Mardiana. (2024). Pendidikan Sebagai Investasi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4).
- Dunn, W. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Epiani, M. (2022). Anak jalanan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang. *Jurnal Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya*, 1(1), 89-101. <https://journalempirika.fisip.unsri.ac.id/index.php/empirika/article/download/127/pdf/547>
- Ernianti, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar. *Skripsi*.
- Fadila, Z., Afnibar, & Hutagaol, H. (2023). Motivasi Pengamen di Kota Padang. *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 15(1), 26-43. Motivasi pengamen di Kota Padang | Fadila | Al Irsyad : Jurnal Bimbingan Konseling Islam
- Hasan, Z., Ristianti, R. S., & Novita, E. (2023). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 394-402. Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung | Hasan | TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum
- Kencana, U., Yuswalina & Triyandhy, E. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Simbur Cahaya*, 27(2). <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1039>
- Khibran, M. F., Hasni, Kadir, R., Syukur, M., & Ahmad, M. R. S. (2022). Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 164-171. [PDF] Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar | Semantic Scholar
- Khoirin, Purnawan, H., & Anggraini, D. (2020). Analisis kebijakan program pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial di Ogan Ilir. *Jurnal Publisitas*, 7(2), 140-148. <https://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/article/download/53/23>
- La Taslim, & Sifatu, W. O. (2023). Fenomena Pengemis Anak di Kota Kendari. *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 7(2), 232-244. Garuda - Garba Rujukan Digital
- Lewis, O. (1966). The Culture of Poverty. *Scientific American*, 215(4), 19-25
- Luthfi, M. A. & Syaefullah. (2024). INOVASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN. Diploma Thesis, IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/19344/>
- Mahdiyah, N. (2023). Studi literatur kebudayaan kemiskinan pada pengemis di perkotaan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 46-54. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Mualip, I., & Rosidin, A. (2023). Implementasi Kebijakan Penanganan Pengamen Jalanan di Kota Serang.

- Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 7(2), 167-171. jurnal-lp2m.umnaw.ac.id
- Nugraha, R. A., Prayoga, A. D., Prayoga, A. D., Amaliya, M., Prama, Y. D., Puspika Sari, S. J., & Febrianti, Y. (2023). Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1983>
- Pemerintah Kota Palembang. (2017). Evaluasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan, Pengemis, dan Pengamen. *The Journalish*, 3(2), 120-135. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/download/573/445/1906>
- Pratama, F. (2021). Pusat budaya Palembang di 13 Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal STUPA*, 3(2), 1761–1774. <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i2.12383>
- Puannandini, D. A., Al Hisyam, F. A., Purnama, D. A. A., & Alin, R. R. (2025). Hak asasi anak dalam realitas kehidupan sehari-hari: Studi kasus anak sebagai pengamen jalanan. *Jurnal Media Akademik*, 3(7).
- Puri, A., & Hertati, D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1-11.
- Putri, L. A. (2023). Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Skripsi, Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Dinas Sosial Kota Palembang). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21695>
- Rahmatina, A. R. (2023). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DAN PENGEMIS JL. JENDRAL SUDIRMAN KOTA PALEMBANG. [Skripsi]. UIN Raden Fatah Palembang, Palembang. repository.radenfatah.ac.id
- Syafron, U. C., Umari, T., & Yakub, E. (2022). Agresivitas Anak Korban Eksploitasi Di Simpang Lampu Merah Merah Mall SKA Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3). Agresivitas Anak Korban Eksploitasi Di Simpang Lampu Merah Mall Ska Pekanbaru | Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)
- Syamsu, S., & Fahmi, M. N. (2024). Jaminan hak asasi manusia dalam dinamika perkembangan konstitusional. *Syntax Idea*, 6(06), 2716–2727. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>